# Dinamika Perburuhan Selama 2008

DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping 9 koran nasional dan 11 koran lokal (*Kompas, Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Suara Merdeka, Metrot TV News.Com; Equator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar*), serta beberapa buletin dan majalah perburuhan. Analisis ini terutama menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.

## Pengantar

Di penghujung akhir tahun 2008, perhatian media massa di Indonesia tampak terfokus memberitakan dua kejadian besar; krisis finansial global dan persiapan pemilu 2009. Krisis finansial global menuai beragam reaksi. Sementara, persiapan pemilu diwarnai beragam prediksi terkait munculnya aktor-aktor politik lama dan aktivis dalam kontestan partai dan calon legislatif.

Bertautan dengan krisis finansial global, Pimpinan Kabinet Indonesia Bersatu, Susiolo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), bersiap-siap mengeluarkan paket stimulus fiskal Rp 73,3 triliun, *Buy Back* saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK), serta para buruh disuguhi Perarturan Bersama Empat Menteri (PB 4 Menteri) serta berbagai *policy* lainnya. Dalam kesempatan tersebut pula muncul sentimen perlunya melindungi ekonomi nasional dan pasar dalam negeri. Hal-hal ini diungkapkan oleh para pengamat dan beberapa politisi.

PB 4 Menteri mendapatkan tanggapan dari ribuan buruh di berbagai daerah. Tanggapan mereka diungkapkan dengan berbagai cara; kampanye massa menolak pencabutan PB 4 Menteri, November 2008 lalu. Buruh yang tergabung dalam berbagai asosiasi maupun federasi Serikat Buruh (SB) tidak segan-segan mengatakan, bahwa pemerintah hanya berpihak pada pengusaha-pengsuaha besar. Peraturan Bersama yang diprakarsai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang ”Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global”, dinilai semakin memarjinalkan kepentingan para buruh. Pasal 3 PB 4 Menteri menyebutkan, aturan kenaikan upah minimum buruh tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Alhasil, aksi-aksi tersebut mampu mendesak pihak pemerintah untuk merevisi PB 4 Menteri. Pasal yang awalnya berbunyi ”Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan tidak melebihi pertumbuhan ekonomi nasional”, menjadi ”Gubernur dalam menetapkan upah minimum diupayakan memperhatikan tingkat inflasi di masing-masing daerah”.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah berkeyakinan bahwa PB 4 Menteri bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, sebagai akibat menurunnya order dari pasar internasional.

Penerbitan PB 4 Menteri dan reaksi keras serikat buruh menarik dicermati. **Pertama**. PB 4 Menteri terbit ketika terjadi krisis finansial global. Isinya kurang lebih mengatur ketetapan upah minimum yang dilakukan secara bipartit. Krisis finansial yang dipicu ambruknya sektor keuangan Amerika Serikat (AS) menjalar ke negara-negara lain; Eropa dan Asia. Ekonomi Indonesia yang banyak berhubungan dengan pasar internasional terkena dampaknya. Karena itu, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan, nilai tukar rupiah melemah dan terjadi penarikan modal investor asing.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya PHK massal, pemerintah pun mengeluarkan serangkaian kebijakan; mengeluarkan stimulus fiskal sejumlah Rp 73,3 triliun atau 1,4% dari Product Domestic Bruto (PDB) Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2009. Paket stimulus ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mempertahankan daya saing usaha, peningkatan ekspor serta peningkatan belanja infrastruktur padat karya dan diperkirakan dapat menyerap kurang lebih 3 juta penganggur. Bagi dunia usaha, pemerintahan menjanjikan pembebasan bea masuk, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk badan usaha, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), fasilitas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan, potongan tarif listrik untuk industri, penurunan harga solar, bantuan pembiayaan UMKM melalui koperasi usaha rakyat (KUR) dan jaminan ekspor.

Dengan demikian, selain meluluhlantahkan harta para konglomerat raksasa di bursa saham AS, krisis finansial ikut mengubah asumsi-asumsi dan target-target pembangunan ekonomi nasional pemerintah. Padahal selama 2000-2007, perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan kisaran antara 4 – 5 persen per tahun, karena peranan investasi dan ekspor semakin menguat. Indikator-indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inflasi rata-rata tahunan mengalami penurunan dari 9,35 persen pada 2000 menjadi 6,59 persen pada 2007. Suku bunga SBI mengalami penurunan dari 14,5 persen pada 2000 menjadi 8,00 persen pada 2007. Demikian juga jika diamati dari nilai tukar rata-rata tahunan mata uang rupiah terhadap dolar, di mana pada periode krisis (1998) sebesar 10.210 telah menjadi 9.140 pada tahun 2007 (Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai tahun). Dengan hitung-hitungan demikian, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 6,8 persen selama 2008. Malangnya, hitung-hitungan itu harus rela diubah, karena beberapa indikator ekonomi mengalami koreksi cukup signifikan.

**Tabel I**
**Tren PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja**

| | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* |
|---|---|---|---|---|
| **Neraca Nasional** | | | | |
| PDB Riil (% y-o-y) | 5,5 | 6,3 | 6,2 | 4,3 |
| Permintaan Nasional, diluar inventory (% y-o-y) | 3,7 | 6,0 | 9,9 | 4,4 |
| Konsumsi Ril: Privat (% y-o-y) | 3,2 | 5,0 | 5,3 | 4,0 |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto Riil (% y-o-y) | 2,9 | 9,2 | 12,7 | 3,5 |
| Pengangguran Terbuka (%) | 10,3 | 9,8 | 8,4 | 9,8 |
| **Sektor Eksternal** | | | | |
| Ekspor, FOB (% y-o-y, US$ Milyar) | 19 | 14 | 9,9 | -8,8 |
| Impor, FOB (% y-o-y, US$ Milyar) | 6,3 | 15,4 | 25,7 | -12,1 |
| Neraca Perdagangan (US$ Milyar) | 29,7 | 32,8 | 22,5 | 24,0 |
| Neraca Pembayaran (% PDB) | 3,0 | 2,5 | 0,1 | 1,0 |
| Utang Pemerintah (% PDB) | 39,2 | 35,1 | 35,6 | 33,5 |
| Rata-rata Kurs Rp/US$ | 9.143 | 9.163 | 9.767 | 10.650 |
| **Lainnya** | | | | |
| Tingkat Suku Bunga BI (% akhir tahun) | 9,75 | 8,0 | 9,25 | 7,50 |

Tentu saja, pada 2009, pengeluaran dan belanja negara harus difokuskan untuk mengatasi dampak fatal krisis finansial global dan pemilu 2009. Dari tabel di atas, Produk Domestik Bruto (PDB) riil pada 2008 sebesar 6,2 persen dan menjadi 4,3 persen pada 2009. Permintaan riil privat dari 6,0 (2007) menjadi 9,9 (2008), sementara impor semakin meningkat dari 15,4 (2007) menjadi 25,7 (2008), pengangguran terbuka pun dapat ditekan 4 digit dari 9,8 (2007) menjadi 9,4 (2008), sayangnya Pembentukan Modal Tetap Bruto menguat dari 9,2 (2007) menjadi 12,7 (2008). Hitung-hitungan di atas mencurigakan, karena pembentukan modal tetap lebih besar sementara pengurangan pengangguran terbuka berubah dalam angka yang sedikit.

**Kedua.** Reaksi serikat buruh begitu keras menuntut pencabutan PB 4 Menteri. Menjelang akhir tahun biasanya serikat buruh menuntut kenaikan upah. Kali ini, mereka lebih fokus menolak PB 4 Menteri. Kebersamaan serikat buruh terbukti efektif mendesak kebijakan, juga menggugah perhatian masyarakat. Setelah mengalami

revisi, aksi protes itu kembali meredup bahkan ada yang menerima revisi. Dalam beberapa kesempatan kebutuhan akan kebersamaan antarserikat buruh, bahkan antargerakan sosial selalu dikemukakan. Usaha-usaha membangun jaringan dalam bentuk front, forum maupun aliansi terus dilakukan, baik yang bersifat momentum maupun yang memiliki program jangka panjang. Sayangnya keberbedaan itu membuahkan pelemahan terhadap *bargaining position* serikat buruh.

Keadaan ini bernasib sama dengan memandang dan menyikapi pemilu 2009. Pascareformasi serikat buruh banyak bermunculan. Hingga 2006 tercatat 87 federasi serikat buruh (SB) di departemen tenaga kerja dan transmigrasi (depnakertrans). Ketidaksamaan dalam menyikapi pemilihan umum (pemilu) 2009 terlihat dari; ada serikat buruh yang secara organisasional terlibat dalam pemilu 2009, ada pula serikat buruh yang mendirikan partai buruh, ada pula serikat buruh yang tidak secara organisasional, tetapi hanya pimpinannya saja terlibat dalam pemilu 2009, bahkan ada serikat buruh yang menolak dan menyerukan golongan putih (golput) kepada anggotanya. Baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat pemilu 2009, sama-sama memaknai bahwa parlemen yang berjalan selama ini tidak memiliki keberpihakan. Inilah tantangannya, jika asosiasi-asosiasi pengusaha Indonesia mau dan bersepakat dalam mengurangi upah 2009, jika unsur-unsur pemerintah bersepakat dalam menelurkan PB 4 Menteri, bagaimana dengan serikat buruh.

Dari segi tuntutan, aksi tersebut merupakan protes langsung terhadap kebijakan negara. Sehingga aksi-aksinya pun diarahkan langsung ke pemerintah yang berkuasa. Hal ini merupakan sinyelemen kuat mengenai pemahaman serikat buruh, bahwa setiap kebijakan negara sedikit merepresentasikan kepentingan warga, terutama buruh.

Apakah situasi ini merupakan pertanda pergeseran dari perjuangan ekonomisme menjadi perjuangan ekonomi-politik? Hipotesis ini memiliki kaitan dengan keterlibatan beberapa aktivis serikat buruh dalam gelanggang pemilu 2009 maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Konon, PB 4 Menteri diterbitkan dengan melibatkan unsur-unsur buruh dalam lembaga tripartit nasional. Namun, serikat buruh di tingkat wilayah maupun di tingkat pabrik dengan gegap gempita dan penuh semangat menolak PB 4 Menteri. Satu pihak ada kesan bahwa suara pimpinan serikat buruh tidak selalu berbanding lurus dengan suara kepentingan di bawahnya. Dengan bahasa lain, bahwa suara pimpinan serikat buruh tidak selalu mencerminkan suara massa buruh, terutama dalam memaknai kebijakan pemerintah, khususnya pengaturan upah.

Selain itu, PB 4 Menteri membawa dampak langsung bukan hanya kepada buruh-buruh manufaktur. Sayangnya, kiprah buruh tani, buruh media massa masih luput dari pengamatan. Padahal situasi buruh tani tidak jauh berbeda dengan buruh manufaktur. Bahkan ada yang berpendapat situasi buruh kebun lebih mengerikan daripada buruh manufaktur.

**Ketiga.** Kemenangan-kemenangan gerakan serikat buruh berupa kebebasan berserikat dan berpendapat memang dirasakan hasilnya. Mungkin saja krisis finansial global berkaitan erat dengan akan naiknya harga-harga bahan baku industri dan permintaan pasar Eropa dan AS akan menurun. Pemerintah dengan *haqulyaqin*, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan buruh. Memang ada kesan pemerintah berusaha melindungi buruh. Namun, tidak ada kewajiban apalagi sanksi bagi pihak pengusaha agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana diulas para pengamat, bahwa dampak krisis finansial global akan

memukul sektor permintaan dari industri yang tergantung pasar internasional. Dalam hal ini, pemerintah hanya perlu melakukan pengelolaan pasar dalam negeri dan menyiasati gempuran produk impor. Hanya saja, PB 4 Menteri menetapkan aturan baru ketentuan upah minimum yang tidak boleh melebihi angka inflasi. Tentu saja, kebijakan ini menyakiti perasaan kaum buruh. Mungkin saja situasi ini berpengaruh besar terhadap partisipasi politik buruh menjelang pemilu 2009; di satu sisi kesulitan ekonomi merupakan keadaan yang membuat warga menjadi apolitis dan di sisi lain, kesulitan ekonomi merupakan ruang terjadinya *money politics*.

## Kemiskinan dan Pengangguran

Terkait dengan krisis finansial global, Presiden Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono, di media massa mengatakan, bahwa rakyat Indonesia sudah terbiasa menghadapi krisis. Karena itu, tidak perlu khawatir. Dalam kesempatan lain, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan hal yang kurang lebih sama, ”ancaman PHK hanya ada dalam pikiran. Jadi, jangan dibesar-besarkan.” Sementara itu, Deputi bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas, Prasetidjono Widjojo, mengatakan, pemerintah hanya akan mengoptimalkan program-program yang telah berjalan dan optimalisasi anggaran. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, perhatian maupun kebijakan pemerintah tidak menghadirkan terobosan baru untuk mencegah lonjakan kemiskinan akibat krisis keuangan global. Pemerintah akan mengandalkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Beras Rakyat Miskin (Raskin), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

PNPM Mandiri pada 2009 direncanakan akan mencakup seluruh kecamatan di Indonesia dengan anggaran 1 – 3 miliar. Pendanaan PNPM Mandiri secara dominan dibiayai dari pinjaman (utang) luar negeri. Melalui program tersebut, pada 2008 angka kemiskinan ditargetkan akan berkurang 15 persen dari total

penduduk. Sedangkan pada 2009, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran sebesar 8,2 persen dan 5,1 persen (detikfinance.com, Sabtu, 08/12/2007). PNPM Mandiri diasumsikan dapat menciptakan wirausahawan yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja. Sementara itu, BLT diyakini dapat mempertahankan jumlah penduduk miskin.

Menurut Ikhsan Modjo, secara metodologis, program BLT tidak dapat mempertahankan apalagi mengurangi angka kemiskinan. Justru pada periode 2008 terjadi pertambahan angka kemiskinan. Menurutnya, indikator garis kemiskinan di Indonesia pada 2008 dan 2009 diperkirakan akan berkisar di Rp 199.000-Rp 200.000 per bulan, atau meningkat 18-19 persen ketimbang garis kemiskinan 2007. Untuk itu, perbaikan kondisi kemiskinan minimal membutuhkan kenaikan konsumsi 20 persen dari orang termiskin. Sebagaimana diungkapkan oleh Deputi Gubernur Senior Miranda Goeltom dan Direktur Eksekutif ECONIT Henri Saparini, selama ini, apalagi saat krisis, pemerintah hanya fokus pada pengamanan asumsi-asumsi dan target APBN, tidak menghiraukan dampak krisis dan akiabt pilihan-pilihan kebijakannya. Padahal APBN ditopang oleh indikator angka pertumbuhan ekonomi yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja. Hal ini, dibuktikan dengan kinerja ekonomi Indonesia tidak menunjukkan perbaikan per Desember 2008. Pertumbuhan ekonomi berjalan di bawah 6 persen, nilai tukar rupiah tidak stabil, imbasnya hutang pemerintah membengkak dan cadangan devisa akan terkuras. Lagi-lagi, APBN pasti akan terkuras untuk menalangi hutang daripada memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, PNPM Mandiri, BLT maupun Raskin menjauhi intervensi penyebab kemiskinan, yakni struktur dan orientasi kebijakan pemerintah. Bini Buchori berpendapat, bahwa program-program pemerintah bersifat parsial atau sementara. Karena itu, dampaknya tidak bersifat panjang sehingga kemiskinan akan sulit diatasi (Investor Daily Indonesia, 02 Juli 2007).

Bagi masyarakat umum, selama 2008 krisis dirasakan dengan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Meskipun pemerintah menurunkan harga premium dari Rp 6.000 menjadi Rp 4.500, pada Desember 2008, kebijakan ini dinilai tidak akan

berpengaruh signifikan. Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat telah terjadi sejak subsidi-subsidi kesehatan, BBM, listrik, air, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu kebijakan yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok adalah kenaikan 28,7 persen harga BBM Mei 2008. Waktu itu, salah satu alasan yang dikemukakan pemerintah adalah kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 100 US dolar. Akibat kenaikan ini, hampir seluruh kebutuhan pokok ikut merangkak naik. Karena itu, upaya pemerintah menurunkan harga BBM pada akhir 2008, diduga kuat tidak berpengaruh besar, bahkan disinyalir hanya memperbaiki citra menjelang pemilu 2009. Akhir 2008, harga BBM diturunkan karena harga minyak dunia mengalami penurunan. Jadi, kebijakan tersebut sama sekali tidak berasal dari inisiatif pemerintah. Dorongan pasar internasional ini menandakan bahwa telah terjadi pencabutan subsidi BBM. Lebih jauh, penurunan harga BBM tidak akan mampu mencegah laju peningkatan angka kemiskinan.

Memang tidak mudah mendefinisikan kemiskinan. Karena itu, para ahli hanya menetapkan indikator garis kemiskinan. Indikatornya pun berbeda-beda. Indikator sederhana menetapkan angka kemiskinan adalah nilai upah buruh. Langsung maupun tidak langsung buruh merupakan pihak yang mendistibusikan pendapatannya ke masyarakat luas. Seperti diakui Asian Development Bank (ADB) maupun Badan Pusat Statistik (BPS), “Kemiskinan tinggi di Indonesia tidak lain karena turunnya nilai upah buruh. Contoh, kenaikan upah buruh 20 persen dapat menurunkan tingkat kemiskinan 10 persen.“ (Tempointeraktif.com, 02 Juni 2005).

Pada 2009, upah minimum provinsi secara nasional mengalami kenaikan rata-rata 10 persen.

## Tabel II
## Perbandingan upah 2008 dan 2009: Upah Yang Tertinggi dan Terendah

| Peringkat | Provinsi | UMP 2008 | UMP 2009 | KHL |
|---|---|---|---|---|
| Tertinggi I | Nangroe Aceh Darusalam | 1,000,000 | 1,200,000 | 1.650.000 |
| Tertinggi II | Papua | 1,105.500 | 1.216.100 | 1.700.000 |
| Terendah I | Jawa Barat | 568.193.39 | 628.191.15 | 731.680 |
| Terendah II | D.I. Yogyakarta | 586.000 | 700.000 | 820.484 |

*Diolah dari oleh LIPS dari berbagai sumber*

Ketetapan UMP berlaku di atas laju inflasi tahun kalender (Januari-November) 2008 sebesar 11,10 persen, sedangkan laju inflasi "year on year" (November 2008 terhadap November 2007) sebesar 11,68 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut: kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,13 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,23 persen, kelompok sandang 0,72 persen, kelompok kesehatan 0,37 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,26 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok bahan makanan 0,67 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,31 persen (BPS, November 2008). Dari angka-angka tersebut, kenaikan UMP 2009 simetris dengan angka inflasi.

Naiknya angka inflasi sebagian besar disumbang dari kenaikan harga makanan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Selama ini, pemerintah menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN), melalui

pencabutan subsidi listrik, BBM dan pendidikan menyumbang besar terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Seperti dalam tabel II, ternyata angka kenaikan UMP masih 90 persen dari angka kebutuhan hidup layak. Seperti penetapan UMP 2008, meskipun mengalami kenaikan 8-10 persen, komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditetapkan kontroversial. Salah satu alasannya, bahwa KHL yang ditetapkan dewan pengupahan berdasarkan KHL 2007 sebelum kenaikan BBM 28,7 persen. Pun dalam soal UMP 2009, selain komponen tidak mencapai KHL sampai 100 persen, penetapan KHL ini masih berdasarkan kebutuhan hidup buruh yang masih lajang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa KHL itu tidak diperhitungkan berdasarkan belanja hidup layak seorang buruh. Secara sederhana, kenaikan UMP rata-rata 10 persen diserobot dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sejak Juli-November 2008.

Artinya, kenaikan-kenaikan upah yang tidak diringi dengan pengontrolan harga kebutuhan pokok tidak akan berdampak positif terhadap taraf hidup buruh. Upah buruh yang mengalami kenaikan per tahun, tidak sebanding dengan fluktuasi bahkan inflasi harga yang terjadi per bulan. Upah riil buruh tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari buruh. Karena itu, pada saat bersamaan buruh tetap harus ”bertarung” dengan kenaikan inflasi. Dengan demikian, upah riil buruh diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan hidup sekitar tiga minggu.

Jika buruh menerima upah di bawah inflasi, berarti tidak boleh memiliki uang lebih. Kebijakan pemerintah mengendalikan kenaikan upah minimum pada akhir 2008, justru kontradiktif dengan target pengurangan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, Angka kemiskinan diperkirakan akan terus bertambah karena disumbang dari jumlah PHK.

Persoalan lain yang mengiringi ketetapan upah minimum adalah perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Sebab, meski UMP sudah ditetapkan, masih banyak yang membayar buruh di bawah UMP. Fenomena ini dapat ditemukan pada para buruh toko dan rumah makan dan sebagainya. Hasil penelitian

Lembaga Demografi FE UI pada pertengahan 2008 kepada buruh tani di Bojonegoro (Jawa Timur), Kendal (Jawa Tengah), dan Lombok Timur (NTB), bahwa jumlah upah yang diterima buruh tani berkisar Rp 15.900 per hari atau Rp 413.474 per bulan.

Meskipun Permenakertrans No. 17/VIII/2005 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan upah minimum harus berdasar pada komponen hidup layak (KHL), seringkali perusahaan berdalih tidak mampu. Untuk 2009 banyak perusahaan mengajukan penundaan upah; Jawa Barat 81 perusahaan, Jateng 77 perusahaan, Jawa Timur 29 perusahaan, DI Yogyakarta 28 perusahaan, Banten 8 perusahaan, Sulawesi Selatan 6 perusahaan, DKI Jakarta 5 Perusahaan, dan Lampung 1 perusahaan (Kompas, 3/02/2009).

Dengan ketentuan upah di bawah KHL serta perusahaan-perusahaan yang menangguhkan upah praktis kemiskinan akan semakin melonjak. Persoalan kemiskinan perburuhan erat kaitannya dengan perlindungan, pengakuan serta jaminan hak-hak dasar buruh (Akatiga, 1999). Namun, sejak dilegalkannya sistem kerja kontrak dan *outsourcing*, tingkat kesejahteraan buruh semakin menurun. Penelitian TURC menyebutkan, pada 1997 upah minimum buruh mampu membeli 350 kg beras (dengan harga beras Rp 700 per kg), sedangkan upah minimum buruh 2008 hanya mampu untuk membeli beras sebanyak 160 kilogram beras (dengan asumsi harga beras Rp 5.000 per kg di tahun ini). Ini bermakna upah riil buruh berkurang hampir 50 persen (Lembur, 17 Nopember 2008).

Bagi buruh, di tengah gempuran kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan lonjakan pengangguran, upah minimum barangkali jalan terbaik daripada tidak bekerja sama sekali.

Hingga 2009, angka pengangguran diperkirakan akan terus meningkat (lihat tabel III) (Fahmi, 23/07/2007). Data BPS menunjukkan, dari 102,05 juta orang yang bekerja, hanya sekitar 28,52 juta orang yang bekerja sebagai buruh/karyawan di sektor formal. Industri adalah penyedia lapangan kerja formal terbesar. Sebaliknya, sektor pertanian yang lebih banyak bersifat informal menyerap 42,69 juta tenaga kerja dari total penduduk yang

bekerja pada Februari 2008. Seperti disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, pemerintah secara bertahap akan memindahkan pekerja informal ke lapangan kerja formal. Penciptaan lapangan kerja formal ini akan diupayakan melalui industri padat karya (*labour intensive*), industri kecil dan menengah, serta industri yang berorientasi ekspor. Prioritas kerja ini sebetulnya pernah diprogramkan oleh pemerintah sebelumnya, namun tampaknya belum banyak mengalami kemajuan. Melalui kerangka pasar tenaga kerja yang fleksibel, pemerintah dan pengusaha berambisi dapat menyediakan lapangan kerja yang luas yang pada gilirannya dapat melakukan formalisasi tenaga kerja informal.

**Tabel III**
**Perkiraan Data Penduduk, Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Bekerja dan Penganggur 2003-2009**

| URAIAN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Penduduk (ribu jiwa) | 213.734 | 216.372 | 219.010 | 221.496 | 223.962 | 226.468 | 226.954 |
| Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa) | 151.936 | 154.858 | 157.780 | 160.550 | 163.320 | 166.090 | 168.880 |
| Angkatan Kerja (ribu jiwa) | 103.416 | 105.678 | 107.940 | 110.064 | 112.228 | 114.372 | 116.516 |
| Pertumbu-han Ekonomi (%) | 4,02 | 4,43 | 5,01 | 5,29 | 5,91 | 6,50 | 7,14 |

*Sumber: Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, dikeluarkan oleh Depnakertrans.*

Di mata pemerintah, penyerapan tenaga kerja selalu dihubungkan dengan kehadiran para investor di Indonesia. Implikasinya, masalah pengangguran tetap dijauhkan dari kemungkinan dilakukannya penanggulangan langsung oleh sektor negara. Dengan kerangka pikir demikian pemerintah percaya bahwa pengangguran hanya dapat ditangani dengan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif (Fahmi, 03/07/2007). Akhirnya, negara terus didorong untuk tetap lebih mengutamakan para investor daripada kepentingan sebagian besar rakyat miskin. Karena pengangguran "disematkan" pada kehadiran investor asing, maka jumlah warga menganggur tergantung ada tidaknya investor.

Rencana formalisasi tenaga kerja dapat terlihat dari konversi pasar tradisional menjadi pasar modern. Selain alasan kenyamanan, perubahan pasar tradisional juga mendorong perubahan status para pekerja toko kelontong menjadi pekerja toko modern, semisal *hypermarket* dan *minimarket*. Hanya saja, konversi ini tidak menghitung korban yang dilokalisir menjadi toko besar. Di Tasikmalaya Jawa Barat dengan luas kota hanya 171 kilometer persegi ini telah berdiri sembilan *supermarket* dan 13 *minimarket, plus* satu *hypermarket,* yaitu Giant yang berada di dalam kompleks perbelanjaan Mayasari Plaza. Sebelum berubah wujud menjadi pusat belanja modern, lokasi ini adalah pasar tradisional. Data tambahan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia juga membuat miris. Pada tahun lalu (2007), sebanyak 4.707 pasar tradisional atau sekitar 35 persen dari total pasar tradisional yang ada di Indonesia ditinggalkan pedagang, karena pasar tradisional kalah bersaing dengan retail modern di lokasi yang sama. Alhasil, jumlah pedagang tradisional pun terus turun. Pada 2007, jumlah pedagang pasar tradisional sebanyak 12,625 juta dan pada 2008 menjadi 11 juta orang. Sedangkan jumlah pedagang kaki lima meningkat dari 11 juta menjadi 14 juta pada 2008.

Selain konversi pasar tradisional menjadi pasar modern, yang turut andil menambah angka kemiskinan adalah konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Selama 2000-2002 saja, luas konversi lahan sawah yang ditujukan untuk pembangunan nonpertanian, seperti kawasan perumahan, industri, perkantoran,

jalan, dan sarana publik lainnya rata-rata sebesar 110,16 ribu hektar per tahun (Sutomo, 2004). Ini berarti terdapat sekitar 3000 hektar sawah per hari yang beralih fungsi ke nonpertanian. Di daerah Jawa Barat, misalnya, yang sejak dulu dikenal sebagai lumbung padi nasional, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 ha per tahun. Sawah-sawah yang berubah fungsi itu terdapat di Karawang, Bandung, Garut, dan Cianjur. Sementara itu, di Bekasi, sekitar 8.000 hektar sawah beririgasi berubah jadi areal industri dan perumahan. Di Sumatera Selatan, yang memiliki lahan persawahan seluas 727.441 hektar, kecepatan lenyapnya sawah subur rata-rata 8% per tahun.

Fakta di atas, menjelaskan bahwa reforma agraria yang pernah digaungkan pemerintah SBY-JK awal januari 2007 lalu, tidak lebih dari program revitalisasi pertanian *ala* Soeharto. Revolusi hijau yang dipraktikkan jaman Soeharto telah menyumbang terhadap maskulinisasi tenaga kerja pertanian dan pertambahan pengangguran di pedesaan. Selain itu, Dalam laporan ILO mengenai tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2008, terungkap tren positif pertumbuhan ekonomi sejak 2006 sampai sekarang tidak dinikmati oleh pekerja (Kompas, 21 Agustus 2008). Sedikitnya 52,1 juta buruh masih menerima upah kurang dari 2 dollar AS per hari. Upah sekitar 18.500 per hari itu jelas membuat pekerja hidup dalam kemiskinan. Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini ada 102,5 juta orang yang bekerja. Artinya satu dari dua orang yang bekerja menerima upah 2 dollar per hari (Dinamika, Semester I 2008).

## Pemutusan Hubungan Kerja

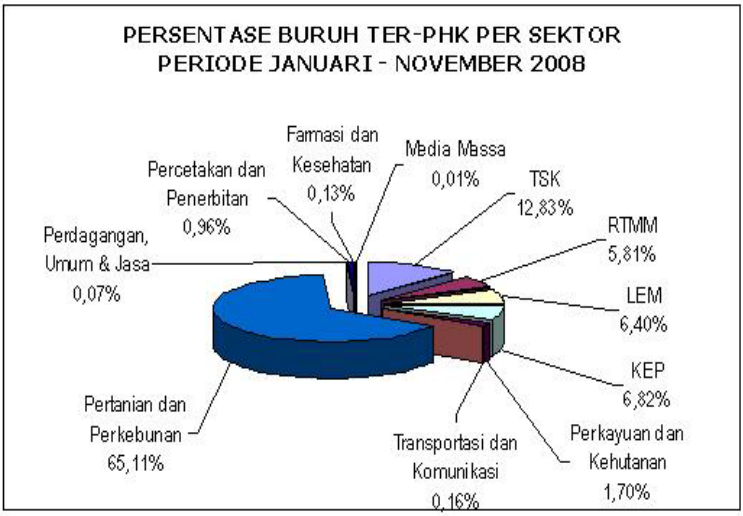
Pada Awal Desember 2008, dengan agresif sektor perkebunan sawit telah mem-PHK 300.000 orang, Tekstil dan Produk tekstil (TPT) telah memecat 80.000 orang, sektor alas kaki memecat 30.000 orang, sektor konstruksi memecat 150.000 orang dan beberapa perusahaan melakukan pengurangan *shift* kerja. Para "pengeluh" yang tergabung dalam asosiasi pengsuha Indonesia (Apindo) menyatakan PHK pada periode akhir tahun ini merupakan akibat langsung dari krisis finansial global. Menurut

mereka, sejak terjadinya krisis finansial global kapasitas produksi dan order mengalami penurunan drastis.

Sebaliknya, berdasarkan pemantauan LIPS, periode Januari hingga November 2008, sebanyak 633,719 orang yang terkena PHK. Angka ini lebih besar dibandingkan 2007 yang mencapai 44.600 buruh. Pada akhir 2008 terjadi peningkatan PHK yang lebih besar. Krisis finansial global yang menganga sejak 2007, kemudian diikuti krisis energi barangkali dijadikan alasan mujarab untuk melakukan PHK.

Periode 2008, PHK disumbang 65,11 persen atau 412, 641 orang dari sektor pertanian dan perkebunan. Secara berturut-turut diikuti oleh sektor Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) 81,320 orang (12,83 persen), KEP 43,199 orang (6,82 persen), LEM 40,529 orang (6,40 persen), RTMM 36,846 orang (5,81 persen), Perkayuan dan Kehutanan 10,796 orang (1,70 persen), Transportasi dan Komunikasi 1,000 orang (0,16 persen), Perdagangan, Umum dan Jasa 418 orang (0,07 persen), Percetakan dan Penerbitan 6,076 (0,96 persen), Farmasi dan Kesehatan 854 orang (0,13 persen), dan Media Massa 40 orang (0,01 persen) (lihat grafik IV).

**Grafik IV**
**Frekuensi PHK 2008**



Informasi yang diterima LIPS, PHK yang tejadi selama tahun 2008 tidak saja karena krisis finansial global. Sebuah perusahaan di Serang, Banten melakukan PHK dengan alasan relokasi antar provinsi. Alasan relokasi seringkali dikaitkan dengan tingginya upah buruh. Selain itu, ada juga sebuah perusahaan di Jawa Tengah melakukan relokasi antar desa. Setelah itu, buruh di PHK, kemudian membuat keputusan: kalau mau bekerja lagi, pekerjaan dihitung dari nol masa kerja.

Seperti diketahui, bagi pengusaha besar undang-undang ketenagakerjaan masih terlalu protektif. Karena itu, mereka berkali-kali mencoba merevisi dan mengarahkan aturan perburuhan lebih fleksibel. Setelah gagal meliberalisasi (merevisi) UUK No. 13/2003 dan RPP pesangon, tampaknya para pengusaha tidak patah arang mencoba mencari celah. Momentum krisis finansial global dimanfaatkan sebaik-baiknya melakukan sirkulasi pem-PHKan buruh tetap dan merekrut buruh kontrak.

Seperti grafik IV di atas, sektor perkebunan dan pertanian merupakan penyumbang terbesar angka PHK. Padahal pada 2007 sektor perkebunan dan pertanian tergolong minim. PHK di sektor perkebunan membesar pada Januari 2008 sebanyak sejumlah 4.000 orang dan November 2008 sejumlah 418.000 orang. Pemicu PHK di sektor perkebunan dan pertanian dimungkinkan karena terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia dan penurunan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional. Padahal, sektor perkebunan dan pertanian terbilang sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Karena itu, jika sektor ini mengalami pukulan, maka akan terjadi pembengkakan angka PHK.

Pemerintah menempatkan sektor perkebunan dan pertanian sebagai agroindustri dalam skala besar. Sektor ini diperkirakan mampu menggenjot angka ekspor. Per 2008 luas kebun sawit di Indonesia telah mencapai 7,4 juta hektar dengan perkiraan hasil minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) mencapai 18,7 juta ton. Sepertiga bagian dari CPO tersebut digunakan untuk konsumsi domestik, sedangkan sisanya ditujukan untuk ekspor. Perkebunan sawit juga dianggap mampu menampung banyak

tenaga kerja dengan perbandingan 36 : 100. Artinya, setiap 100 hektar kebun sawit, ada 36 buruh yang bekerja mengelolanya. Dari kalkulasi di atas, bisa dihitung setidaknya ada 2,8 juta buruh yang saat ini sedang mencari rejeki di kebun sawit. Jumlah itu masih akan bertambah bila orang-orang yang berstatus buruh harian lepas (BHL) di kebun sawit juga dihitung sebagai buruh perkebunan (Sawit Watch, 2008).

Sejak Agustus 2008, harga pasar CPO dunia mengalami gejolak; terjun bebas ke angka yang sulit diterima secara psikologis. Berdasarkan penelitian Sawit Watch, penyebab kejatuhan harga CPO dikarenakan: (1) krisis ekonomi membuat beberapa negara tujuan ekspor CPO Indonesia, seperti Pakistan, India dan China, membatalkan kontrak pembelian minyak sawitnya. (2) Kebijakan Uni Eropa menurunkan penggunaan penggunaan biodiesel dari 15 persen menjadi 10 persen setelah harga minyak fosil mengalami penurunan yang cukup signifikan. (3) Persaingan komoditas minyak nabati di pasar dunia akibat musim panen. Dampaknya, beberapa perusahaan mulai mengurangi jam kerja para buruhnya. Bahkan ada perusahaan sawit tidak lagi menggunakan tenaga buruh harian lepas (BHL) ketika musim penyemprotan, pemupukan atau panen sedang berlangsung.

Berbeda dengan klaim pemerintah maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), bahwa PHK akan terjadi pada awal 2009. Ternyata, sejak Oktober-November 2008 telah terjadi PHK massal pada 6 sektor; perkebunan dan pertanian, TSK, RTMM, LEM, KEP serta Perkayuan dan Kehutanan. Pengusaha maupun pemerintah berkilah, bahwa resesi kali ini lebih baik dari pada periode 1997-1998.

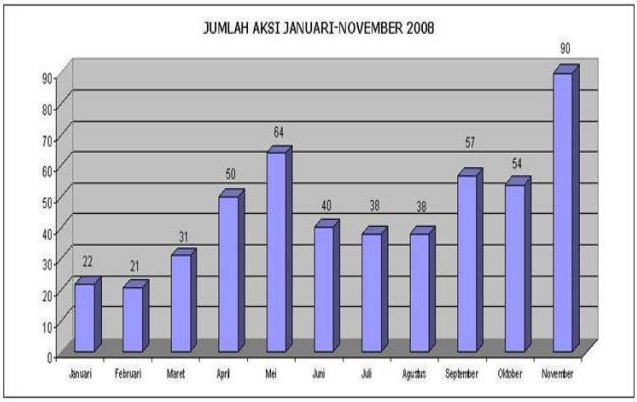
Ancaman PHK massal, seolah jadikan alat negosiasi pengusaha untuk mendapatkan konsesi-konsesi. Akhirnya, pengusaha mendapatkan keuntungan berlipat dari situasi krisis. Hal ini, menujukkan bahwa posisi buruh semakin melemah. Sebagaimana sinyalir Walhi, PT. RAPP memecat dan merumahkan buruhnya dengan alasan krisis. Walhi menduga, bahwa hal ini merupakan trik pengusaha untuk mendapatkan kemudahan akses serta perluasan pengelolaan hutan alam.

Semenjak dilegalkannya sistem kerja kontrak dan *outsoucing*, melalui UUK No.13/2003, PHK marak terjadi. Praktik PHK merupakan pintu masuk perusahaan untuk merekrut tenaga kerja kontrak dan/atau *outsourcing* (Dinamika, Semester I 2008). Data-data di atas, hanyalah data yang terberitakan oleh media massa. Besar kemungkinan PHK lebih besar dari angka yang terekam. Dan, situasinya pasti akan dilematis, peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah memiliki kesan mengakomodir suara pengusaha. Namun, pada sisi lain, krisis pun akan dijadikan alasan untuk menekan upah dan PHK. Karena itu, yang perlu disikapi sejauhmana krisis finansial berdampak langsung terhadap sebuah perusahaan.

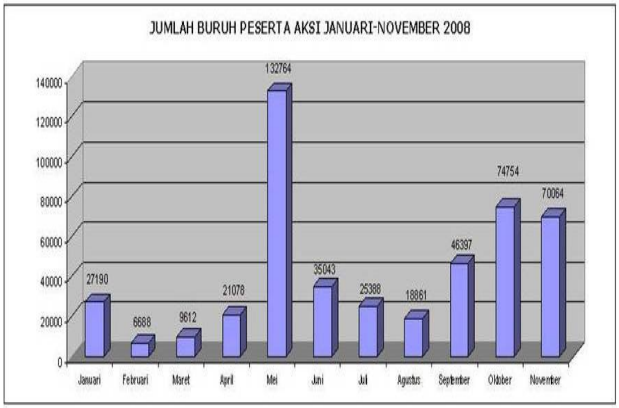
## Resistensi dan Tuntuan Aksi Massa Buruh

Sebagaimana diketahui, protes massa yang dilakukan oleh gerakan buruh maupun gerakan sosial lainnya pascareformasi semakin banyak. Jumlah massa maupun jumlah aksinya fluktuatif. Berdasarkan catatan LIPS, selama Januari-November 2008, sepanjang Januari sampai November 2008 telah terjadi 505 kali aksi protes. Intensitas aksi protes massa buruh paling banyak muncul pada November (grafik V). Peringkat ke dua, intensitas aksi terjadi pada Mei 2008. Pada Februari jumlah aksi mengalami penurunan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, periode November 2006 dan 2007 aksi protes massa buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum, maka pada 2008 penolakan PB 4 Menteri.

**Grafik V**
**Jumlah Aksi Buruh Periode Januari-November 2008**




**Grafik VI**
**Jumlah Peserta Aksi Buruh Periode Januari-November 2008**



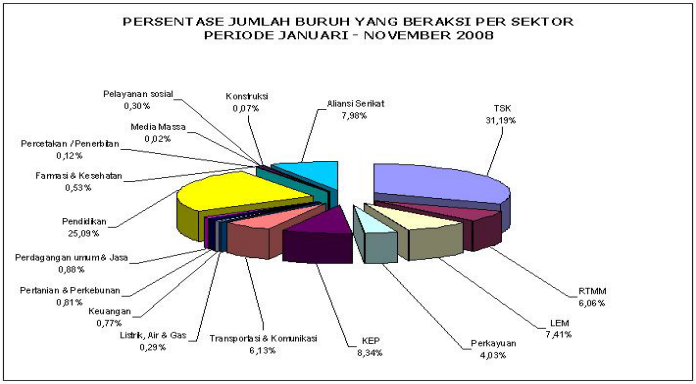

Intensitas aksi buruh pada bulan November 2008 sangat besar. Tampaknya, momentum krisis finansial global, momentum kenaikan upah serta penentapan PB 4 Menteri membuat kesal para buruh yang turut mendorong intensitas aksi. Meskipun

intensitas aksinya tinggi, tapi partisipan massa buruh yang terlibat dalam relatif sedikit. Peserta aksi buruh masih tumpah di periode Mei 2008.

Jumlah peserta aksi protes massa buruh pada Mei 2008 mencapai 132.764 orang, sedangkan pada November 2008 hanya 74.754 orang. Bulan Mei rata-rata aksi dipusatkan di Jakarta. Pada bulan ini pula momentum-momentum semisal Hari Buruh Internasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Jatuhnya Soeharto, Tragedi Semanggi. Jika berpijak pada banyak dan sedikitnya momentum, maka sangat dimungkinkan pada bulan tersebut bertemu dengan gerakan sosial lainnya. Karena itu, banyaknya keterlibatan aksi protes dalam periode Mei disumbang dari jumlah gerakan sosial lainnya (grafik V).

Sementara pada November 2008, meskipun intensitas aksinya tinggi tapi keterlibatan peserta aksi relatif sedikit. Mungkin saja ada aksi-aksi di depan pabrik yang tidak ter-*cover*, yang menyebabkan jumlah peserta massa aksi menurun. Selain itu, barangkali penurunan jumlah peserta aksi berkaitan dengan tradisi aksi protes yang masih tergantung kasus khusus dan momentum.

**Grafik VII**
**Persentase Jumlah Aksi Buruh Per Sektor**
**Periode Januari-November 2008**



Seperti terlihat di grafik VII, dari jumlah peserta aksi dan intensitas aksi, yang terbanyak peserta aksi diwakili oleh sektor Tekstil Sandang dan Kulit (TSK) sebanyak 31,19 persen. Kemudian peringkat ke dua ditempati sektor pendidikan. Industri tekstil, sejak dihilangkannya kuota tekstil pada 2005 lalu, merupakan industri yang sangat rapuh: kondisi kerja yang buruk serta upah rendah. Faktor tersebut mungkin saja menjadi pengaruh resistensi buruh TSK. Rata-rata aksi memang dikoordinir oleh organisasi serikat, karena itu data ini menunjukkan rata serikat berbasis di sektor manufaktur, khususnya TSK. Sementara itu, pekerja media massa masih menujukkan resistensi rendah.

Keadaan pekerja media massa, tidak jauh berbeda dengan situasi buruh-buruh lainnya. Menurut informasi, rata-rata jurnalis yang hampir tidak bisa menabung, bekerja 24 jam seminggu tanpa uang lembur, bekerja di lapangan tanpa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sisi lain, masih juga ditemukan kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Faktanya masih pengusaha media yang tidak mengimbangi kerja jurnalisnya dengan upah/kesejahteraan yang layak. Dalam survei AJI Indonesia 2005, 400 jurnalis dari 77 media di 17 kota Malang, masih terdapat jurnalis yang diupah kurang dari Rp 200 ribu. Upah ini jauh lebih rendah ketimbang upah minimum yang ditetapkan pemerintah. AJI Denpasar mendapatkan data, upah jurnalis di Denpasar paling tinggi Rp 1.800.000 (take home pay) dan paling rendah Rp 550.000 (take home pay) per bulan. Tidak jarang jurnalis pun mendapatkan ancaman, kriminalisasi maupun PHK dari para pemilik media (fspmindependen.wordpress.com, 2008)

Pekerja media massa merupakan produk logis dari membludaknya industri media. Saat ini, terlepas hanya menyajikan program musik atau benar-benar mengandung acara *news,* terdapat hampir 900 media cetak, 2.000 stasiun radio, serta 70 televisi (baik swasta nasional maupun lokal), plus sejumlah media *online*. Menjelang Pemilihan Umum 2009, kemungkinan besar jumlah media bakal bertambah. Dari segi jumlah tenaga kerja industri media massa terbilang sedikit, yang diperkirakan

berjumlah 8.000-10.000 (Harsono, 2008). Tidak seperti di industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan organisasi, berserikat di kalangan jurnalis termasuk rendah. Fakta ini kalah dengan pertumbuhan asosiasi pemilik media yang tumbuh subur bak jamur di musim hujan.

Dari grafik V, VI dan VII, aksi yang paling dominan terjadi pada Mei, Oktober dan November, jumlah peserta aksi paling banyak pada Mei yang didominasi buruh manufaktur. Jika dibandingkan dengan 2007, di mana aksi-aksi didominasi pekerja pendidikan, maka pada 2008 aksi massa banyak diwakili oleh sektor TSK. Kenapa grafik pekerja pendidikan mengalami penurunan, sedangkan aksi-aksi TSK meningkat. Dapat dilihat dari soal kebijakan pemerintah, soal tuntutan dan soal momentum.

Aksi-aksi protes yang dilakukan masih terbatas dan terikat momentum. Hal ini diperlihatkan dengan kehadiran aksi protes menjelang 1 Mei (Hari Buruh), 2 Mei (Hari Pendidikan Nasional). Intensitas aksi mengalami penurunan menjelang Januari dan Februari. Jumlah peserta aksinya pun mengalami penurunan ketika tidak mendapatkan momentum yang sama. Hal ini perlihatkan dengan kehadiran peserta aksi pada November 2008. Adalah sangat mungkin jika saat terbitnya PB 4 Menteri dan jelang penetapan upah minimum yang merasa berkewajiban menolak hanya para buruh manufaktur. Artinya, kenaikan upah di buruh masih diartikan untuk kepentingan para buruh di tingkat paling bawah.

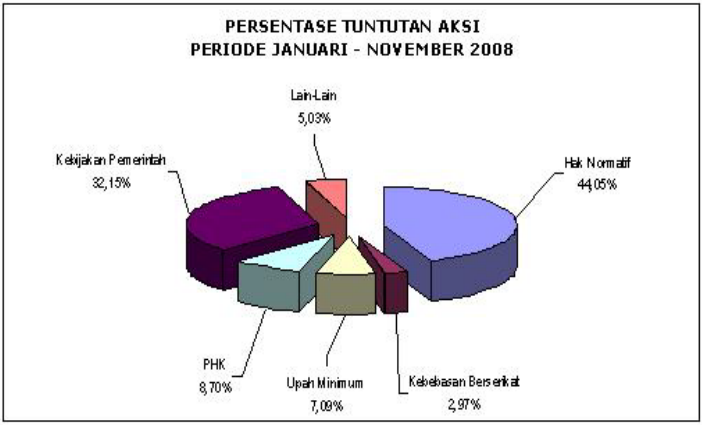
Kebijakan pemerintah pada 2008 pekerja pendidikan memang mengalami pelemahan, terutama karena deraan regulasi privatisasi lembaga pendidikan. Namun, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan CPNS bagi tenaga kerja honorer dan guru bantu, melalui program Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang dikhususkan tenaga honorer. Terlepas dari ilusi pengangkatan tenaga pendidik honorer manjadi PNS, program pemerintah melalui pembukaan CPNS ternyata mendapatkan ”sambutan” baik.

Sebenaranya, persoalan tenaga pendidik berkaitan pula dengan kesejahteraan guru di satu sisi, dan demokratisasi di sisi lain:

jabatan fungsional guru dan jabatan struktural kepala sekolah. Di berbagai daerah masih ditemukan guru bantu dan guru honorer yang mendapatkan gaji Rp 200.000 per bulan. Selain itu, organisasi guru masih didominasi oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meskipun ada guru, maupun guru honorer serta guru bantu yang membuat serikat independen, masih belum menunjukkan resistensi yang ”menggigit”. Padahal situasi pendidikan semakin hari akan semakin suram, setelah disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Lalu bagaimana jika dilihat dari aspek tuntutan? Tuntunan Serikat Buruh masih berkisar pada tataran normatif, yakni sekitar 44,05 persen. Hak normatif diartikan sebagai hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang, seperti: tunjangan, hak cuti haid, hak cuti hamil. Tuntutan-tuntutan konkret lainnya, berupa menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (8,70%), upah minimum (7,09%), dan kebebebasan berserikat (2,97%) masih kalah dengan tuntutan penolakan kebijakan pemerintah berupa penerbitan regulasi, yang mencapai 32,15 persen.

**Grafik VIII**
**Persentase Tuntutan Aksi**
**Periode Januari-November 2008**



Penolakan kebijakan pemerintah paling banyak dilakukan pada November 2008. Sedangkan tuntuan ”lain-lain” adalah tuntutan yang berkisar pada: pergantian dewan direksi, perbaikan dan/atau korupsi di manajemen perusahaan, yang menempati peringkat 5,03 persen. Dari ke enam kategori tuntutan di atas, paling banyak dilakukan pada Mei, Oktober dan November 2008.

Dari aspek tuntutan, memang ada kesan resistensi aktif. Serikat buruh berkali-kali menolak revisi UUK No. 13/2003, RPP pesangon dan PB 4 menteri. Tuntutan serikat buruh mulai mengarah pada kebijakan negara. Namun perlu dicatat aksi protes yang mengarah pada kebijakan negara dan dilakukan di lokus-lokus kekuasaan hanya berkaitan dengan persoalan perburuhan. Sedikit sekali aksi protes yang dapat mewakili isu-isu di sektor lain, semisal Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan penolakan impor beras.

Dengan demikian, dapat disimpulkan. *Pertama*, jika merujuk pada data PHK (grafik IV), di mana PHK banyak terjadi di sektor perkebunan dan pertanian, dengan membandingkan pada jenis tuntutan yang didominasi oleh isu-isu normatif. Maka, resistensi buruh masih berkutat pada isu yang berkaitan dengan isu-isu ekonomis. Isu-isu ini selalu berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari para buruh. *Kedua,* tingginya angka PHK selama 2008 dibanding 2007, akan membawa dampak siginifikan bagi keanggotaan dan masa depan serikat buruh. Dengan kesulitan ekonomi yang sangat tinggi, serta tingkat kesadaran yang rendah, apakah isu PHK dapat menjadi pengikat resistensi, memerlukan kajian mendalam. Masalah selanjutnya, bagaimana jika buruh di-PHK kemudian ditawarkan dua pilihan: kerja kontrak atau PHK dengan pesangon. Ini berkaitan dengan isu apa yang strategis dalam jangka pendek tapi membawa dampak jangka panjang. Terkait dengan hal ini adalah propaganda pemerintah dan pengusaha mengenai dampak krisis finansial global terhadap perusahaan. Dalam beberapa kesempatan sangat terlihat bahwa pengusaha menjadikan isu krisis finansial global untuk menekan upah atau PHK. Dalam kesempatan demikian, posisi tawar buruh pun melemah. Jika serikat tidak memiliki argumen memadai tentu saja akan mudah dikelabui. Karena itu, strategi apa yang tepat untuk menyelesaikan soal perburuhan dalam konteks-

konteks seperti ini. *Ketiga*, dengan memperhatikan waktu aksi, yakni terjadi pada Mei, Oktober dan November, maka aksi-aksi masih terikat momentum hari-hari besar. Momentum Hari Buruh Internasional, Hari Pendidikan Nasional, serta reaksi penolakan Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2004, RPP Pesangon dan PB 4 Menteri. Keterikatan pada momentum pun masih terbatas berkaitan dengan momentum perburuhan (buruhisme) dan terkait dengan kasus khusus. Sejauhmana pemaknaan serikat buruh terhadap momentum-momentum lain, semisal hari tani nasional (24 September) dan hari tani internasional, perlu memerlukan kajian lebih mendalam.

## Catatan

Krisis finansial global begitu efektif menekan upah buruh dan mengancam kepastian kerja. Kelompok industri yang rentan untuk tersapu oleh krisis adalah; *pertama*, sektor industri yang bergantung pada ekspor produk, terutama dengan tujuan AS dan Eropa. Masuk kategori ini adalah tekstil, kayu/meubel, dan kerajinan. *Kedua*, sektor industri yang komponennya tergantung dari bahan baku impor, terutama bahan baku kapas, suku cadang, dan sebagainya. Masuk dalam kategori ini adalah otomotif, elektronik, dan sebagainya. *Ketiga*, sektor industri yang banyak terkait pendanaannya (finansial) dengan institusi keuangan yang sedang kolaps, sehingga berpeluang terseret dalam krisis likuiditas. Para pengamat ekonomi makro menyatakan, bahwa krisis finansial ini tidak siklik. Yang sementara adalah *recovery*-nya, proses-proses *recovery* inilah yang tidak tanggung-tanggung mengorbankan jutaan buruh. Bahkan ada pengamat yang menyatakan, krisis pasti terjadi dalam waktu lima tahun sekali.

Pada sisi lain, kebijakan-kebijakan perburuhan yang digodok di parlemen hampir tidak mendekati hak-hak dasar buruh. Gonjang-ganjing pemilu 2009 dengan 44 partai politik kontestan pemilu mulai menujukkan diri di sudut-sudut jalan dan di media massa. Para calon legislatif dan calon presiden pun mulai memperkenalkan muka dan programnya. Selain partai-partai lama, pemilu 2009 pun muncul partai-partai baru. Beberapa partai baru merupakan representasi dan perpecahan dari partai

lama. Pemilu 2009 pun diwarnai dengan masuknya beberapa aktivis ke gelanggang pemilihan elektoral. Dari beberapa nama calon legislatif, ada sejumlah aktivis secara sadar masuk ke panggung politik praktis menjelang pemilu 2009.

Di kalangan perburuhan pemilu cukup memperlihatkan tingkat pemaknaan yang berbeda. Ada serikat buruh yang secara organisasional beraliansi dengan partai tertentu kemudian terlibat dalam pemilu. Ada pula serikat buruh yang hanya memperbolehkan pimpinan/anggotanya terlibat dan bertarung dalam pemilihan anggota legislatif. Namun ada pula yang menegaskan diri menolak pemilu serta menyerukan tidak memilih (golongan putih/golput). Baik yang menolak maupun yang menerima pemilu, rata-rata berkeyakinan bahwa partai-partai lama maupun baru memiliki rekam jejak tidak berpihak pada buruh. Rata-rata serikat buruh pun memahami bahwa posisi parlemen ikut menentukan nasib buruh.

Berdasarkan pengalaman, dalam pemilu legislatif 5 April 2004, angka golput menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni mencapai 23,34 persen atau 34,5 juta rakyat. Dari 34,5 juta orang yang golput, 23,5 juta orang di antaranya tidak datang ke tempat pemungutan suara. Di berbagai pilkada –pilkada di beberapa daerah, angka golput menunjukkan angka rata-rata 20-30 persen dari jumlah pemilih. Tidak asing, jika aliansi partai-partai besar di parlemen digagas dan memproduk legislasi yang jauh dari kepentingan rakyat. Situasi ini telah mendorong berbagai kelompok masyarakat mendirikan partai politik baru. Selain itu, parpol-parpol baru di motivasi oleh konflik-konflik elit dari partai-partai lama, sehingga tipe partai baru seperti ini kebanyakan diisi oleh ”muka-muka lama”.

Di tengah hingar bingar pemilu 2009, massa buruh akan menjadi arena pertarungan suara partai politik. Dengan basis identitas yang lemah dan pengalaman praktik yang rendah, selain dituntut memainkan peranan maksimal untuk anggota, serikat buruh dituntut mampu memainkan strategi pengorganisasian yang lihai. Pada masa Soekarno, meskipun jejaknya hampir tidak ada, serikat-serikat buruh di Indonesia pernah mengalami pengalaman baik dan sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Peraturan-

peraturan perburuhan pun sangat menghargai tenaga kerja yang dimiliki buruh. Tentu saja, keberhasilan ini tidak dihasilkan dengan *cespleng*. Saat ini, di beberapa daerah serikat buruh pernah pengalaman berharga. Sebuah serikat pekerja di Pasuruan mampu memidanakan manajemen perusahaan. Tindakan manajemen perusahaan yang menghalang-halangi pembentukan serikat akhirnya ”diringkus” di pengadilan. Meskipun metode ini tidak tergolong praktis, tampaknya patut dicoba.

Sementara itu, kondisi internal serikat buruh juga tak luput dari masalah. Selain harus berhadapan dengan konflik eksternal dalam konteks hubungan industrial dan tripartit, serikat pekerja juga seringkali dilanda konflik internal yang cukup pelik. Fragmentasi organisasi serikat buruh sudah bukan rahasia lagi. Karenanya, alih-alih ingin membangun *bargaining position* dalam kerangka hubungan industrial, organisasi serikat pekerja juga dihadang pekerjaan rumah yang sulit di organisasinya. Kondisi ini tentu cukup menguras energi serikat buruh, sekaligus memperburuk citra serikat pekerja di mata publik dengan tampilnya kesan sebagai organisasi yang *fragmented*, egois, dan parsial (Demos, 2008).

Karena itu, serikat buruh penting merefleksikan kembali arah perjuangan ke depan. Penting bagi serikat untuk membangun paradigma dan perspektif baru, strategi, metode dan pola perjuangan agar lebih siap dan tidak gagap menghadapi tantangan-tantangan perburuhan. Saat ini, serikat buruh dituntut mampu, misalnya untuk merangkul kereradaan buruh kontrak atau *outsourcing,* sembari berupaya mempertahankan keberadaan anggota dan memperkuat kemampuannya. Lebih jauh dari itu, serikat dituntut mampu melakukan perjuangan politik secara bersama-sama, perjuangan buruh untuk mendapatkan hak-haknya dan menjadi lebih sejahtera memerlukan perjuangan politik yang lebih jelas, bukan dalam artian terbatas hanya politik praktis (pemilu), tetapi terus menggalang kekuatan agar posisi tawarnya semakin diperhitungkan. Dan yang terpenting semua itu dilakukan secara bersama-sama.

* * *